

BAB IV

PEMINDAHAN KEDUTAAN BESAR GUATEMALA KE YERUSALEM SEBAGAI ALAT MEMPERKUAT HUBUNGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT

Bab ini menjelaskan faktor yang menyebabkan Guatemala memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem tahun 2017-2018. Guatemala sangat bergantung dengan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Dalam mempertahankan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat, Guatemala memanfaatkan hubungan “persahabatan”nya dengan Israel dengan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Hal ini membuat Israel secara tidak langsung menjadi alat yang digunakan Guatemala untuk menjaga hubungannya dengan Amerika Serikat. Diketahui bahwa Guatemala adalah salah satu negara penyumbang imigran terbesar di Amerika Serikat. Imigran dari Guatemala diketahui banyak yang ilegal dan ini ditakutkan akan menyebarkan “kejahatan” di Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat juga tergantung dengan keamanan dan kesejahteraan Guatemala untuk keamanan masyarakatnya.

Bab ini akan diuraikan dalam tiga sub-bab dimana diawali dengan sejarah hubungan Guatemala dengan Amerika Serikat yang menjadi cikal bakal hubungan mereka dari militer, ekonomi, dan politik sampai saat ini dan dilanjutkan dengan hubungan Guatemala dan Amerika Serikat kontemporer dan diakhiri dengan adanya hubungan saling ketergantungan antara Guatemala, Israel, dan Amerika Serikat.

A. Sejarah Hubungan Guatemala dengan Amerika Serikat

Guatemala dan Amerika Serikat menjalin hubungan pertama kali ketika Guatemala menjadi salah satu anggota Republik Federasi Amerika Tengah. Amerika Serikat mengakui Federasi ketika Presiden James Monroe menerima Antonio José Cañaz sebagai Utusan Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh pada 4 Agustus 1824. Pada pemerintahan

Presiden Justo Rufino Barrios tahun 1873 sampai 1885 memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat dengan adanya keterbukaan keahlian asing dalam mengembangkan infrastruktur Guatemala. Pemerintahnya mendorong impor peralatan pertanian modern dari Amerika Serikat dan juga teknisi dari Amerika Serikat membantu memasang lampu listrik dan pembuatan selokan di Guatemala City. Barrios mengundang seorang pejabat kepolisian Amerika Serikat yang berdomisili di kota New York untuk mereorganisasikan polisi yang berada di Guatemala. Maka dari situ dimulailah hubungan penting antara pasukan keamanan Amerika Serikat dengan Guatemala. Ketergantungan Guatemala semakin dalam pada era Presiden Manuel Estrada Cabrera (1898-1920). Pada tahun 1904, Minor C. Keith, seseorang pemilik perusahaan besar bernama *United Fruit Company* (UFC) menerima kontrak dari pemerintah Guatemala untuk menyelesaikan pembangunan kereta api yang ditinggalkan oleh rezim Barrios. Barrios memberikan balasan berupa beberapa bagian tanah di Guatemala untuk perusahaan Amerika Serikat itu (Streeter, 2000).

The United Fruit Company dibangun pada tahun 1899 dimana ini merupakan sebuah penggabungan antara dua perusahaan sukses di Amerika Latin saat itu yaitu Boston Fruit and Keith. Dua perusahaan ini memiliki berhektar-hektar lahan sepanjang Amerika Tengah dan Karibia dan bagian besar dari jalur kereta api. Sejarah UFC berawal dari seorang imigran miskin bernama Sam Zemurray yang memiliki ide untuk perdagangan pisang di Amerika Tengah. Idennya ini membuat ia memiliki perusahaan besar pada saat itu. Keunggulan UFC di Guatemala didorong ketika perusahaan memperoleh proyek yang besar yaitu *International Railways of Central America* (IRCA) dan perusahaan telepon negara, mengontrol perekonomian negara secara de facto (Vasalli, 2014).

Adanya krisis ekonomi pada tahun 1929 dimana pasar kopi menurun membuat perekonomian Guatemala juga ikut menurun dan mengakibatkan banyaknya pengangguran di

seluruh penjuror negeri. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Guatemala melaporkan ada keresahan di antara kelas-kelas pekerja pada tahun 1930 sehingga para kelompok elit Guatemala berkumpul dan menuntut seseorang pemimpin yang kuat, pemimpin yang kuat ini ialah Jorge Ubico dimana ketika Ia menjabat sebagai gubernur, Ia banyak memperoleh reputasi. Pada 1931, Ia menang dalam pemilihan karena Ia adalah satu-satunya calon presiden (Gleijeses, 1991).

Pertumbuhan ekonomi pada Amerika Tengah diikuti karena berakhirnya Perang Dunia ke 2 dimana menyebabkan munculnya gerakan modernisasi politik diseluruh wilayah. Di Guatemala, periode ini disebut dengan “The Guatemalan Revolution” or “The Ten Years of Spring”. Dari tahun 1944 sampai 1954, Guatemala berkeinginan membentuk pemerintahan yang demokratis dimana ada pemilihan umum. Pemerintahan ini berfokus pada mencoba memperbaiki masalah sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi akar permasalahan di Guatemala. Pemerintah memiliki tantangan dalam menstabilkan tatanan sosial dan struktur politik (Tomlins, 2011). Sehingga pada saat itu, Ubico digulingkan dalam Revolusi Oktober 1944 dan digantikan oleh Juan Jose Arevalo Bermejo sebagai presiden pertama yang terpilih secara demokratis di Guatemala. Arevalo menetapkan upah minimum, membangun rumah sakit dan sekolah, menetapkan standar kesehatan dan keselamatan, dan mulai menindak praktik tenaga kerja perusahaan besar. Bagi Amerika Serikat, hal itu membuat Arevalo menjadi seseorang yang komunis (Russell, 2015).

Pada tahun 1947, Guatemala dan Amerika Serikat menandatangani sebuah perjanjian Traktat Bantuan Timbal Balik Inter-Amerika atau yang dikenal sebagai Perjanjian Rio. Hubungan kerjasama ini berlanjut selama tiga dasawarsa dengan adanya hubungan militer yang erat diantara kedua negara ini. Hal ini dapat dilihat adanya personil militer Amerika Serikat yang ditugaskan sebagai penasihat pasukan militer di Guatemala. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga memberikan persenjataan dan hampir semua pasukan militer

Guatemala menggunakan peralatan militer Amerika Serikat secara eksklusif. Pasukan militer Guatemala juga diberikan Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET atau *International Military Education and Training*) yang didanai oleh Amerika Serikat. Sekolah layanan ini berada di Amerika Serikat dan Panama. Selama tahun 1950-an dan 1960-an sekitar 115 mahasiswa Guatemala menerima pelatihan semacam itu setiap tahun, tetapi selama tahun 1970-an jumlah itu telah meningkat menjadi sekitar 140. Dari tahun 1978 hingga 1982 tidak ada petugas Guatemala atau NCO yang dilatih di bawah IMET, tetapi beberapa pelatihan dilanjutkan dalam skala kecil di akhir tahun 1982 (Globalsecurity.org, 2017).

Pada tahun 1951, Bermejo digantikan oleh Jacobo Arbenz Guzman yang mana merupakan salah satu pemimpin Revolusi Oktober. Arbenz melanjutkan reformasi Arévalo dengan menghancurkan monopoli transportasi UFC. Pada tahun 1952, Arbenz menandatangani Undang-Undang Reformasi Agraria, Keputusan 900 yang menurut *Central Intelligence Agency* (CIA), tujuannya adalah untuk "mengembangkan ekonomi kapitalis di Guatemala pertanian melalui penghapusan hubungan semi-feodal antara pemilik tanah dan pekerja, apalagi, ia mencari perbaikan metode budidaya melalui bantuan yang memadai." namun, penerapan hukum pembaruan agrarian ini memicu berbagai masalah. Di sisi domestik, situasi agraria dengan konflik latennya didorong ke dalam aksi politik dan hukum. Konflik panjang atas tanah di antara komunitas yang berbeda setiap hari, karena ini dukungan pemerintah diantara sektor-sektor penduduk melemah. Konflik antara pedagang dan industrialis melawan pemilik tanah besar, yang dihasilkan oleh reforma agraria, merusak aliansi pemerintah dengan sektor ekonomi dan politik utama. Akhirnya, konflik terbuka terhadap kepentingan multinasional, terutama Perusahaan Amerika Serikat, *United Fruit Company* (Almengor, 2005).

Pada tahun 1952, Presiden Truman, Presiden Amerika Serikat saat itu bertanya kepada pejabat seniornya apa yang

harus dilakukan tentang permintaan UFC. Jawaban mereka adalah Operasi PBFortune yaitu dengan menggulingkan Arbenz dengan kudeta namun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Dean Acheson, menemukan hal itu dan membatalkannya. Namun, Amerika Serikat memiliki rencana yang lain disebut Operasi PBSuccess. Rencana ini menghabiskan banyak anggaran. Tidak hanya menggunakan cara militer, namun Amerika Serikat juga memiliki kekuatan di media untuk menggerakkan opini publik sehingga rencana ini membuat rakyat Guatemala melawan diktator komunis dan menuntut kebebasan. (Russell, 2015).

Pada 17 Juni 1954, dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat dan CIA, kediktatoran militer Carlos Castillo Armas membuat sebuah invasi. Pasukan penyerang hanya berjumlah 150 orang, tetapi CIA telah meyakinkan Masyarakat Guatemala dan Arbenz bahwa invasi besar sedang berlangsung. Armas menginvasi Guatemala sehingga Arbenz membeli senjata dari Czechoslovakia, tapi itulah yang diinginkan Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat memiliki “bukti palsu” yang secara tidak langsung menuduh Guatemala mendapatkan senjata dari Soviet. CIA mengatur secara rahasia dengan stasiun radio untuk menyiarkan pesan propaganda. Pilot-pilot terampil Amerika Serikat juga disewa untuk megebom titik-titik strategis di Guatemala City. Personil Amerika Serikat menerbangkan pesawat invasi dan mengisi saluran udara dengan transmisi palsu untuk menambah kesan terjadinya invasi. CIA menggunakan mata-mata di dalam militer dan pemerintah Guatemala untuk secara aktif merongrong otoritas Presiden Arbenz, mendemoralisasi pendukungnya, dan memblokir upaya untuk mengalahkan Armas (Feber, 1997).

Tidak menyadari bahwa CIA mendalangi kudeta militer terhadapnya, Arbenz berpaling ke pemerintah AS untuk meminta bantuan, menempatkan kepercayaannya pada seorang yang disebut sekutu yang menyatakan komitmennya kepada memajukan dan menyebarkan demokrasi. Pada hari Minggu, 27 Juni 1954, Presiden Jacobo Arbenz

mengundurkan diri dari kantor dan melarikan diri dari Guatemala. Hal ini bisa dilihat bahwa rencana sebenarnya Amerika Serikat untuk menggulingkan Arbenz berhasil karena Arbenz “mengganggu” perusahaan yang dibuat Amerika Serikat yaitu UFC. CIA menggantikannya dengan seorang diktator militer, Kolonel Carlos Castillo Armas, yang ditunjuk CIA sebagai "pembebas" rakyat Guatemala (Feber, 1997). Walaupun seperti itu, dari tahun 1954 sampai tahun 1960 Guatemala mendapatkan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Itu merupakan jumlah yang sangat banyak dibanding dengan negara-negara Amerika Tengah lainnya yang diberikan bantuan ekonomi oleh Amerika Serikat pada awal perang dingin (Streeter, 1999).

Menteri Luar Negeri Guatemala, Carlos Salazar Gatic, mengonfirmasikan kepada Pemerintah Amerika Serikat bahwa Pemerintahan Guatemala memiliki niat untuk memenuhi kewajiban internasional. Maksud dari kewajiban internasional ini ialah pemerintahan baru yang non-komunis, menikmati dukungan rakyat, serta menguasai keseluruhan wilayah Guatemala. Oleh sebab itu, pada 12 Juli 1954, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Foster Dulles, menginstruksikan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Guatemala City untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Pemerintah Guatemala yang baru. Pada tahun 1976, terjadi gempa yang dahsyat di Guatemala sehingga Kongres Amerika Serikat pada saat itu meloloskan Undang-Undang *Relief* dan Rehabilitasi Guatemala untuk memberikan bantuan darurat, rehabilitasi, serta bantuan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan ini berlanjut dengan hubungan diplomatik yang didirikan pada 4 Agustus 1824, ketika Presiden James Monroe menerima Antonio Jose Canaz sebagai Utusan Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh (U.S Embassy, 2018).

Selama tahun 1960-an, stabilitas pemerintahan Guatemala mulai goyah karena adanya gangguan di dalam politik dan ekonominya. Kekerasan yang terjadi di Guatemala dengan adanya penindasan oleh pemerintah. Adanya ketidakstabilan di Guatemala, Amerika Serikat berfokus

pada membantu perekonomian Guatemala dan bersama bersama militer dan polisi Guatemala untuk membuat lebih efisien dan keamanan internal yang modern dalam melawan komunis. Meskipun Amerika Serikat membantu untuk menstabilkan stabilitas di Guatemala, pada tahun 1963, Presiden Miguel Ydigoras Fuentes dikudeta oleh militer yang merupakan lawan-lawannya di Guatemala. Administrasi Lyndon B. Johnson terus mendukung pemerintah Guatemala dan melanjutkan untuk membantu ekonomi dan militer Guatemala. Walaupun Amerika Serikat sudah membantu, masih adanya kekerasan yang terjadi di Guatemala (Tomlins, 2011).

Rios Montt adalah salah satu diktator militer Guatemala yang berkuasa pada tahun 1982 sampai 1983. Namun lima tahun sebelum Riot Montt mengkudeta pemerintahan sebelumnya, lebih tepatnya pada tahun 1977, Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jimmy Carter memotong bantuan militer ke Guatemala karena alasan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer. Walaupun hubungan militer antara Guatemala sempat tidak baik, namun pada akhir tahun 1982, setelah perjalanan Amerika Latin oleh Presiden Ronald Reagan, sikap resmi Amerika Serikat mulai berubah meski ada penolakan terus menerus di Kongres Amerika Serikat untuk memperbarui bantuan militer Amerika Serikat ke Guatemala. Penentangan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelumnya. Reagan telah berunding dengan Rios Montt di antara para pemimpin Amerika Tengah lainnya, dan mereka berdua memutuskan untuk mengesahkan penjualan 6,4 juta US\$ dalam bentuk suku cadang helikopter dan peralatan militer non-militer lainnya. Keputusan itu dikritik oleh pemerintah Inggris karena posisinya sebagai penjamin integritas teritorial ke Belize yang menjadi bekas jajahan Inggris dikarenakan Guatemala mengklaim sebagian besar dari Belize. Pemerintah Guatemala menyatakan bahwa mereka kekurangan valuta asing yang diperlukan untuk membeli peralatan militer (Globalsecurity.org, 2017).

B. Hubungan Guatemala dan Amerika Serikat Kontemporer

Ketika berakhirnya perang dingin pada tahun 1990-an, kebijakan luar negeri Amerika Serikat bergeser dari militer menjadi *peacebuilding* dimana hal ini terjadi ketika Presiden Clinton meminta maaf saat Ia berkunjung ke Guatemala pada tahun 1998. Permintaan maaf Presiden Clinton mengenai peran militer Amerika Serikat dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk genosida selama perang sipil di Guatemala berlangsung (Janzen, 2008).

Hubungan Guatemala dan Amerika Serikat berlanjut hingga tergabungnya Amerika Serikat sebagai anggota “Friends of Guatemala” bersama dengan Kolombia, Meksiko, Spanyol, Norwegia, dan Venezuela yang ikut berperan penting dalam perjanjian perdamaian perang sipil Guatemala tahun 1996. Setelah adanya perjanjian itu, pemerintahan Amerika Serikat berkomitmen lebih dari 500 juta US\$ untuk mendukung pelaksanaan perdamaian sejak tahun 1997. Sebagian besar bantuan Amerika Serikat ke Guatemala diberikan melalui kantor *United States Agency for International Development* (USAID) untuk Guatemala. Bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat melalui USAID ini masih berjalan hingga saat ini, di tahun 2017 saja Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar 248 Juta Dollar kepada Guatemala. Program saat ini bekerja untuk memajukan tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan berfokus pada potensi Guatemala sebagai ekonomi dan mitra dagang terbesar Amerika Tengah di Amerika Serikat, tetapi juga mengakui indikator sosial negara yang tertinggal dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tiga area fokus untuk program USAID kepada Guatemala dimodelkan setelah *Millennium Challenge Account area* dimana berkuasa secara adil, kebebasan ekonomi, dan investasi dalam masyarakat (GlobalSecurity.org, 2017).

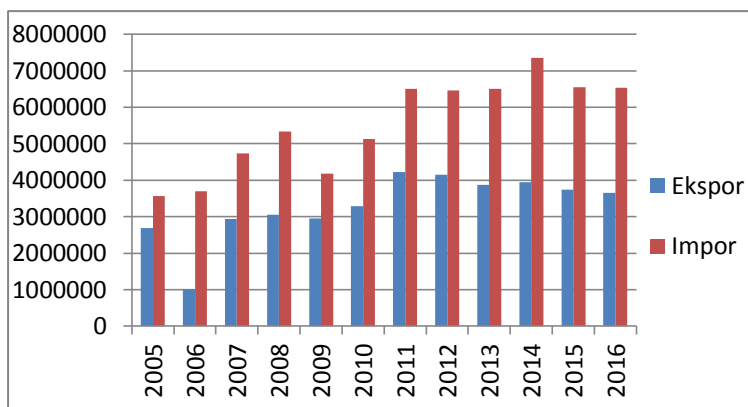
Guatemala tidak hanya diberikan bantuan ekonomi oleh Amerika Serikat, Guatemala dan Amerika Serikat juga memiliki kerjasama ekonomi berupa Perjanjian perdagangan

bebas yaitu *Central America-Dominican Republic Free Trade Agreement* (CAFTA-DR). CAFTA-DR dilaksanakan pada tahun 2006 dimana CAFTA-DR menunjuk pada reformasi yang mendorong transparansi, administrasi kepabeanan, hak kekayaan intelektual, dan peraturan pemerintah. Kritik mencatat bahwa keseimbangan komersial antara kedua negara sebelumnya mendukung Guatemala, dan bahwa Guatemala sudah memiliki akses bebas bea di bawah Prakarsa Lembah Karibia. Sejak CAFTA-DR, keseimbangan telah bergeser mendukung Amerika Serikat (Morales, 2018).

Perjanjian CAFTA-DR ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi dan integrasi regional lebih lanjut dengan menghilangkan tarif, membuka pasar, mengurangi hambatan terhadap layanan, dan mempromosikan transparansi. CAFTA-DR berisi bab tentang investasi yang mirip dengan perjanjian investasi bilateral dengan Amerika Serikat. Ekspor Amerika Serikat ke Guatemala termasuk minyak, produk pertanian, artikel yang disumbangkan untuk pengiriman bantuan. Impor Amerika Serikat dari Guatemala termasuk produk pertanian, pakaian jadi, emas, dan perak (U.S. Department of State , 2018).

Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama bagi Guatemala. Pada tahun 2013, GDP Guatemala mencapai sekitar USD 53,7 miliar US\$. Adanya CAFTA-DR menyebabkan hubungan perdagangan diantara kedua negara ini menjadi lebih kuat dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari sekitar 40 persen perdagangan Guatemala adalah dengan Amerika Serikat. Impor Guatemala dengan dari Amerika Serikat sebesar 5,5 miliar US\$ pada tahun 2013. Hal ini lebih tinggi 95 persen dari tingkat pada tahun 2005, tahun sebelum CAFTA-DR mulai berlaku. Ekspor Guatemala ke Amerika Serikat sebesar 4,2 miliar US\$ pada tahun 2013, meningkat 33 persen dari tahun 2005, tahun sebelum adanya CAFTA-DR. Namun, tidak termasuk produk pakaian jadi, ekspor Guatemala ke Amerika Serikat melonjak sebesar 115 persen sejak 2005 (Export.gov, 2014).

Pada tahun 2016 lalu, total perdagangan Guatemala dan Amerika Serikat mencapai 9,8 milyar US\$. Ekspor Guatemala ke Amerika Serikat berjumlah sekitar \$ 3,9 miliar, dengan pisang, pisang raja, pakaian rajut, pakaian tenunan, kopi, perak, dan emas untuk mayoritas. Impor Guatemala dari Amerika Serikat berjumlah \$ 5,8 miliar. Mayoritas yang diimpor dari Amerika Serikat ialah bahan bakar mineral, mesin listrik, artikel yang disumbangkan untuk bantuan, mesin, dan sereal sedangkan dari bidang pertanian ialah jagung, bungkil kedelai, gandum, unggas, dan kapas. Guatemala adalah mitra dagang terbesar ke-43 Amerika Serikat pada tahun 2016 (Morales, 2018).



(Sumber: *wits.worldbank.org*, 2018)

Bagan 4.1 Ekspor dan Impor Guatemala dengan Amerika Serikat Tahun 2005 sampai 2016

Guatemala tergantung dengan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat karena Guatemala adalah negara yang mana memiliki pemerintahan yang lemah, kemiskinan, kerawanan pangan, kekerasan yang parah, ketidakamanan warga, dan akses yang tidak adil terhadap peluang ekonomi dan layanan sosial. Banyak masalah yang terjadi di Guatemala mendorong migrasi ilegal dan berkontribusi pada organisasi kejahatan transnasional (*Transnational Criminal Organizations* atau

TCO). Oleh sebab itu, Amerika Serikat melakukan upaya untuk mengatasi keamanan, pemerintahan, dan penggerak ekonomi migrasi ilegal dan perdagangan gelap orang dan barang untuk melindungi wargan negaranya sendiri. Selain itu, Misi mencari lembaga demokrasi yang lebih kuat, aturan hukum, dan pembangunan ekonomi di Guatemala yang akan meningkatkan stabilitas dan meningkatkan peluang bagi perusahaan Amerika Serikat (U.S. Department of State , 2018).

Sejarah menunjukkan pada tahun 1830-an, masyarakat Guatemala sudah bermigrasi ke Amerika Serikat dalam angka yang masih relatif kecil. Namun, setelah terjadinya gempa bumi di Guatemala tahun 1917, para imigran meningkat ke Amerika Serikat. Pada tahun 1930-an jumlah imigran menurun dikarenakan adanya batasan kouta imigrasi dari negara-negara Belahan Barat yang diberlakukan pada tahun 1920-an. Jumlah imigran mulai meningkat tahun 1950-an dimana orang Amerika Tengah yang bermigrasi secara hukum ke Amerika Serikat mencapai 45.000 orang dari tahun 1951 hingga 1960 (Hong, 2008).

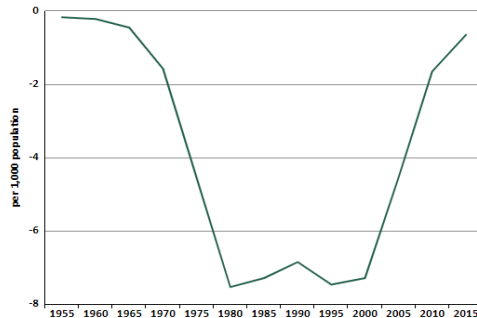
Pada tahun 1970-an, imigran Guatemala meningkat ketika terjadinya perang sipil di negaranya, para imigran ini sebagian besar ialah masyarakat yang bersuku asli Maya yang mana menjadi sasaran dalam perang sipil ini. Beberapa masyarakat Guatemala yang bermigrasi ke Amerika Serikat untuk mencari suaka atas adanya penganiayaan ataupun kekerasan di negaranya. Namun pada saat itu, mereka tidak diberikan status pengungsi oleh Amerika Serikat (Jonas, 2013).

Catatan statistik pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa gelombang signifikan pertama imigrasi Guatemala ke Amerika Serikat dimulai pada tahun 1977. Berdasarkan jumlahnya, imigran Guatemala yang datang ke Amerika Serikat lebih kecil dibanding dengan El Salvador dan negara-negara imigran lainnya. Namun, perubahan persentase dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.599 orang mewakili adanya peningkatan 82 persen dari tahun

sebelumnya dan jumlah terbesar masyarakat Guatemala yang pernah diterima dalam satu tahun. Selain itu, 5.093 orang Guatemala ditangkap karena tidak memiliki dokumen yang mewakili 200 persen dari tahun sebelumnya (Jonas & Rodriguez, 2014).

Imigrasi Guatemala ke Amerika Serikat ini terus berlanjut hingga saat ini. Alasan utama banyaknya masyarakat Guatemala melarikan diri dari Guatemala dan menjadi imigran ilegal ke Amerika Serikat pada saat ini ialah adanya kekerasan, krisis ekonomi yang menyebabkan kelaparan di dataran tinggi barat Guatemala, menurut *United States Custom and Border Protection*, mengutip PBB dan data keamanan pangan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Menurut pejabat dari CBP, bahwa bertahun-tahun panen yang tidak menentu, kekeringan dan dampak buruk dari "coffee rust" pada industri yang mempekerjakan banyak penduduk pedesaan Guatemala mempercepat eksodus keluarga dari desa yang kehilangan makanan (Miroff & Sieff, 2018).

Banyaknya imigran Guatemala di Amerika Serikat membuat Guatemala menjadi salah satu negara pengirim imigran terbesar di Amerika Serikat (Ennis, Ríos-Vargas, & Albert, 2011). Jumlah imigran Guatemala meningkat mulai tahun 1995 sampai tahun 2015, hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini,



(Sumber: *knoema.com*, 2018)

Grafik 4.1 Imigran Guatemala ke Amerika Serikat
Tahun 1995 sampai 2015

Pada tahun 2014, pemerintahan Presiden Obama membuat suatu aliansi untuk kemakmuran di Segitiga Utara (Guatemala, Honduras, dan El Salvador). Pemerintahan Obama memberikan dana 3,75 milyar US\$ selama lima tahun. Wakil Presiden Joe Biden melakukan tiga perjalanan ke Guatemala dari pertengahan 2014 hingga pertengahan 2015, salah satunya hanya bertemu dengan Presiden Otto Pérez Molina untuk membahas satu topik: perpanjangan Komisi Anti-Impunitas yang ditunjuk oleh PBB (CICIG).

Amerika Serikat tidak hanya membantu Guatemala berupa dana namun Amerika Serikat juga berperan penting dalam CICIG. CICIG atau *Commission Internacional Contra la Impunidad en Guatemala* adalah salah satu bentukan dari PBB dimana untuk menjadi badan anti korupsi di Guatemala yang membantu jaksa Guatemala dalam membongkar kejahatan di Guatemala seperti kartel narkoba, pencucian uang, dan korupsi. CICIG ini didanai oleh PBB sebesar 15 juta US\$ dan sekitar setengah dari itu berasal dari Amerika Serikat (The Economist, 2018).

Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat memulai proses penyelesaian perselisihan yang menyatakan bahwa pemerintah Guatemala melanggar komitmen pekerja CAFTA-

DR, keluhan hak-hak buruh pertama yang diajukan berdasarkan perjanjian perdagangan bebas Amerika Serikat. Pada Agustus 2011, Perwakilan Dagang Amerika Serikat secara resmi meminta panel arbitrase. Pada Juni 2017, panel menyimpulkan bahwa meskipun disepakati bahwa Guatemala telah gagal menegakkan undang-undang ketenagakerjaannya dalam kasus-kasus tertentu, Amerika Serikat telah gagal membuktikan bahwa kurangnya penegakan berdampak negatif terhadap perdagangan, seperti yang disyaratkan oleh CAFTA-DR (Morales, 2018).

C. Hubungan ketergantungan Guatemala terhadap Amerika Serikat

Guatemala dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Hal ini tercermin ketika Guatemala membuat suatu keputusan yang berani yang menyatakan Yerusalem sebagai ibukota Israel dengan memindahkan kedutaan besarnya, memiliki alasan yang sangat kuat yaitu Guatemala tergantung dengan bantuan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat sehingga Guatemala pun mengikuti jejak Amerika Serikat yang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Tidak hanya dengan adanya bantuan ekonomi dari Amerika Serikat, kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat bagi Guatemala juga penting karena Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi mitra strategis Guatemala dalam bidang ekspor dan impor barang. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Presiden Guatemala yaitu Jimmy Morales di pertemuan AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) tahun 2018 lalu yang mengatakan bahwa hubungan negaranya dengan Amerika Serikat sangat kuat karena Amerika Serikat adalah mitra komersial utama Guatemala yang mana menjadi konsumen utama dari produk Guatemala dan juga menjadi produsen utama barang dan jasa di Guatemala. Banyak perusahaan Amerika Serikat yang dibangun di Guatemala menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Guatemala, perdagangan, dan berinvestasi di Guatemala (The AIPAC Policy Conference, 2018).

Bantuan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian di Guatemala serta untuk mengurangi tingkat kriminalitas di Guatemala. Diketahui bahwa Guatemala adalah salah satu negara yang memiliki PDB tertinggi di Amerika tengah, namun hal itu berbandingterbalik dengan ekonomi di Guatemala sendiri yang tidak merata sehingga ada beberapa daerah yang masih mengalami kemiskinan. Hal ini disebabkan karena korupsi yang masih merajalela di Guatemala. Dengan adanya korupsi di Guatemala mengakibatkan Guatemala menjadi negara di Amerika Tengah yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi salah satunya yaitu Guatemala menjadi “jembatan” narkoba ke Amerika Serikat. Dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, bantuan ekonomi dari Amerika Serikat sangat diharapkan oleh Guatemala. Hal ini tercantum dalam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jimmy Morales di AIPAC yang menyatakan bahwa:

“Kami juga bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam perang melawan korupsi, perjuangan yang kami dukung dengan peningkatan anggaran substansial untuk sistem peradilan kami di Guatemala, dan dengan rasa hormat mutlak terhadap kelembagaan.....Perlunya mempertahankan demokrasi di Amerika dan dunia, juga sangat mengikat kita dengan Amerika Serikat. Kami juga menjaga dialog politik tingkat tinggi dengan Israel, dan negara-negara kami memiliki persahabatan yang kuat. Amerika Serikat, Israel dan Guatemala berbagi prioritas dan nilai-nilai: perang melawan terorisme, komitmen terhadap keamanan perbatasan, pencegahan migrasi tidak teratur, perang melawan perdagangan narkoba dan senjata, dan perlindungan hak asasi manusia. Inilah mengapa kita harus berdiri bersama dan saling mendukung.” (The AIPAC Policy Conference, 2018)

Oleh sebab itu, kejadian dimana Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem membuat Guatemala mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut. Guatemala mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat terlihat di pernyataan yang diumumkan oleh Presiden Jimmy Morales dalam pidatonya di AIPAC, dapat dikutip sebagai berikut:

“Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Trump karena memimpin jalan. Keputusannya yang berani telah mendorong kami untuk melakukan apa yang benar. Penting untuk menjadi yang pertama, tetapi lebih penting untuk melakukan apa yang benar. Oleh karena itu, sebagai Presiden Guatemala dan orang yang bertanggung jawab untuk kebijakan urusan luar negeri negara saya, yang didukung oleh konstitusi Republik Guatemala, saya memutuskan untuk mengembalikan Kedutaan Guatemala ke Yerusalem. Sebagai keputusan berdaulat, kami mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada bulan Mei tahun ini, kami akan merayakan ulang tahun Israel yang ke 70, dan berdasarkan instruksi saya, dua hari setelah Amerika Serikat menggerakkan kedutaan besarnya, Guatemala akan kembali dan secara permanen memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.” (The AIPAC Policy Conference, 2018)

Keputusan yang dibuat oleh Guatemala juga dapat dilihat bahwa Guatemala memanfaatkan hubungan “sahabat baik”nya dengan Israel untuk memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat. Israel disini menjadi salah satu variabel yang efektif bagi Guatemala untuk membuat Amerika semakin percaya dengan Guatemala untuk membantu perekonomian Guatemala. Guatemala menjadikan Israel sebagai “alat penunjang” hubungannya dengan Amerika Serikat. Disamping itu juga secara tidak langsung, Guatemala membuat hubungan persahabatnya dengan Israel semakin erat yang mana disampaikan oleh Emmanuel Hahshon sebagai juru bicara kementerian luar negeri Israel

bahwa Israel sangat berterimakasih dengan Guatemala dan Israel percaya bahwa hal itu (memindahkan kedutaan ke Yerusalem) adalah pilihan yang tepat dan juga mencerminkan persahabatan yang erat diantara kedua negara (Israel dan Guatemala) (Fox News, 2017). Tindakan pemindahan kedutaan besar ke Yerusalem oleh Guatemala disambut baik dengan pemerintah Amerika Serikat, hal ini dapat dilihat dari pernyataan *White House* Amerika Serikat, yaitu:

“Amerika Serikat menyambut baik kepindahan Kedutaan Besar Guatemala ke Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kami berterima kasih kepada mitra Belahan Barat kami karena bergabung dengan kami dalam mengenali ibukota Israel dan mendorong langkah-langkah tambahan.” (White House, 2018)

Guatemala mendapatkan keuntungan dari Amerika Serikat atas pemindahan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Keuntungan ini berupa mempertahankan kepercayaan Amerika Serikat terhadap Guatemala untuk memberikan bantuan setiap tahunnya kepada Guatemala dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tetap berinvestasi di Guatemala. Ketika Donald Trump mengancam negara-negara yang tidak mengikuti kebijakannya untuk menolak resolusi PBB mengenai Yerusalem dalam bentuk dukungan terhadap Israel berupa menanggguhkan semua bantuan ekonomi membuat Guatemala “takut” ancaman dari Amerika Serikat akan berubah jadi kenyataan. Pada saat konferensi PBB tahun 2017 lalu, Guatemala mengikuti jejak Amerika Serikat untuk menolak resolusi PBB tersebut dan untuk memperkuat bahwa Guatemala masih tetap dapat dipercaya Amerika Serikat, Guatemala juga ikut Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Mempertahankan kepercayaan Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi mitra terbesar Guatemala adalah alasan utama Guatemala mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Amerika Serikat akan menilai Guatemala sebagai negara yang

“tunduk” dengan Amerika Serikat. Hal ini terlihat di USAID (United States Agency for International Development) bahwa Guatemala masih berada di posisi ke-tiga di negara-negara penerima bantuan ekonomi wilayah belahan barat Amerika Serikat sebelum dan sesudah pemindahan kedutaan besar itu terlaksanakan (USAID, 2018). Dapat dikatakan, Guatemala berhasil mempertahankan kepercayaan Amerika Serikat terhadapnya.

Keputusan yang dibuat Guatemala tidak hanya menguntungkan Guatemala namun juga menguntungkan bagi Israel, dimana Israel semakin “percaya diri” dikarenakan negara aliansi terbesarnya yaitu Amerika Serikat dan negara sahabat yang sudah terjalin sekitar 70 tahun yaitu Guatemala, mendukungnya sebagai negara yang berdaulat dengan ibukota Yerusalem. Faktor yang mendasari Guatemala berani memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem dikarenakan adanya ketergantungan dengan Amerika Serikat yang mana dalam hubungan ketergantungan ini menjadikan Israel sebagai sebuah variabel yang digunakan Guatemala untuk memperkuat hubungan kerjasamanya dengan Amerika Serikat semakin erat khususnya dalam bidang ekonomi. Dapat dikatakan, Guatemala mengikuti kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan membuat suatu kebijakan luar negeri terhadap Israel.